GE SPASIAL

VOLUME 13 / NO. 3 / DESEMBER 2015

think spatial to be special

KAMPUSIANA

**MENILIKI BUDAYA BETAWI DI DKI JAKARTA
DALAM SEJARAH MASA KINI**

ULASAN

**PERSPEKTIF EKONOMI BARU
PEROMBAK PAHAM (GEO) EKONOMI ORTODOKS**

GEOGRAFIANA

**MENUJU PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI
OLEH MASYARAKAT LOKAL
DI KAMPUNG CIPANON, TANJUNG LESUNG**

**EVALUASI PELAKSANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA**

EVALUASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Oleh: Osmar Shalih (osmar.shalih@gmail.com)

Pendahuluan

Satu dasawarsa lebih, Indonesia memulai kembali pembangunan pascabencana setelah dihantam bencana besar Tsunami Aceh (2004), Gempa Yogya (2006), Gempa Sumbar (2009) Letusan Gunung Merapi (2010), Banjir Bandang Wasior (2010), dan sebagainya.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia bersama dengan NGO, swasta, termasuk masyarakat untuk memulihkan kondisi kehidupan pascabencana, baik pembangunan manusia, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Regulasi dan kelembagaan yang bersifat *ad hoc* maupun disusunnya peraturan perundangan khusus untuk manajemen penanggulangan bencana telah disusun untuk tujuan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum.

Artikel ini disusun untuk meninjau kembali manajemen penanggulangan bencana, khususnya pada tahap pascabencana di Indonesia dengan berbagai studi kasus.

Pembelajaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tsunami Aceh dan Gempa Yogyakarta

Acapkali secara awan maupun riset penelitian 2 (dua) bencana ini sering diperbandingkan kisah kesuksesan dan kegagalannya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 meluluhlantakkan 230.000 jiwa dengan dampak kerugian pada 14 negara merupakan salah satu bencana terbesar pada abad ini. Praktis beberapa wilayah terdampak mengalami kerugian sangat besar dan *collapse*. Bencana tersebut tentu menjadi perhatian internasional. Saat itu, telah

ada lembaga Sekretariat Bakornas PB yang berfungsi pada penanganan darurat. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dibentuklah lembaga *ad hoc*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tsunami Aceh dan Nias. Lembaga tersebut yang melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan sumber dana maupun bantuan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga masyarakat internasional.

Sementara untuk bencana gempa bumi Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006 tidak membuat pemerintahan tersebut lumpuh. Bantuan dan dukungan internasional juga tidak sebesar Tsunami Aceh. Dari bencana Yogyakarta, kita mendapat pembelajaran "**poin penting dalam proses pemulihan pascabencana adalah kearifan lokal (*local wisdom*)**," dalam bentuk modal sosial yang ditunjukan melalui dukungan penuh dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan yang membuat proses pemulihan selesai lebih cepat dari yang diharapkan.

Belajar dari pengalaman tersebut, serta sadar posisi geografis negara Indonesia yang menjadikannya rawan bencana, Pemerintah Indonesia menyusun regulasi melalui UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang di dalamnya berupa bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif sejak tahap pra-bencana, saat terjadi bencana, hingga pascabencana. Amanat undang-undang tersebut salah satunya adalah pembentukan lembaga penanggulangan bencana yang definitif, ditingkat pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Livelihood

Bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang bersifat jangka panjang seperti menciptakan lapangan kerja dan memperkuat keterampilan khusus atau kejuruan. Pemerintah menyediakan dana yang bersifat stimulan untuk membantu memulihkan mata pencaharian masyarakat terdampak. Masyarakat terdampak diberikan pilihan untuk tetap pada mata pencaharian terdahulu seperti sebelum terjadi bencana, atau alih profesi menyesuaikan kondisi dimana lokasi relokasi. Memperkuat keterampilan tertentu orang yang terkena bencana diyakini lebih efektif dan lebih cepat dalam proses pemulihan masyarakat.

Best practice* untuk proses-proses pemulihan *livelihood

Bencana gempa bumi di Yogyakarta memberikan dampak yang relatif besar pada perekonomian, terutama karena jumlah industri dalam negeri di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sekitar 650.000 pekerja dan 30.000 perusahaan terkena dampak gempa bumi, dengan kerusakan dan kerugian sekitar 90% di sektor swasta yang terkait dengan usaha kecil dan menengah. Melalui kegiatan pemulihan mata pencaharian, lebih dari 2.800 pengusaha mikro dan kecil (UMK) telah meningkatkan keterampilan bisnis mereka dan lebih dari 2.265 UKM memiliki akses ke pasar yang lebih besar. (http://www.javareconstructionfund.org/doc/pdf/2010-10_25_progress_report_2010_bahasa.pdf)

Peran Swasta

Peran sektor swasta dalam pengelolaan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana) tentang pelaksanaan penanggulangan bencana. Dalam pemulihan, Pemerintah akan melibatkan dan mendorong sektor swasta untuk berpartisipasi, tetapi tetap dalam skema rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sektor swasta umumnya berkontribusi dengan menggunakan dana CSR-nya. Di masa depan, peran diarahkan dari sektor swasta untuk menjadi lebih luas. BNPB selalu mendorong untuk mengoptimalkan peran pemerintah / lokal, non-pemerintah pusat (swasta) dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan bangsa dalam bencana.

Sustainable Livelihood

Bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk terus melangsungkan hidup. Fasilitasi dan bantuan oleh pemerintah dilaksanakan instansi teknis terkait untuk membuat masyarakat yang terkena dampak bencana untuk mandiri dan bantuan yang diberikan dapat dipastikan keberlanjutan. Dengan demikian, bantuan yang berkelanjutan dan membuat orang mandiri, tidak membuat masyarakat ketergantungan pada bantuan atau hibah tersebut. Bantuan pemulihan mata pencaharian dilakukan melalui model pemberdayaan masyarakat. Model ini dianggap cocok dengan

kondisi sosial masyarakat Indonesia yang memiliki rasa kerjasama (*cooperation*) dan rasa kebersamaan. Melalui proses penguatan model pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang terkena bencana, diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan sehingga dapat dengan cepat keluar dari masalah. Kedepan, diharapkan juga masyarakat secara berkelanjutan mampu menggali potensi mereka sendiri dan berani untuk bertindak / melakukan inisiatif positif untuk memperbaiki kualitas hidup.

Meminimalisir Resiko Bencana

Resiko bencana dapat dikurangi ketika semua elemen dari pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat) bersama-sama melakukan upaya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas untuk penanganan bencana. Upaya itu dilakukan sebelum bencana, saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana secara komprehensif dan “kesadaran spasial” bahwa ancaman bencana itu akan selalu ada dan bencana dapat terjadi berulang. Kegiatan mitigasi seperti kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, serta pemulihan pascabencana dengan upaya mitigasi struktural dan non-struktural harus berbasis pengurangan risiko bencana di masa depan dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Evaluasi kebijakan *Buffer Zone* dan Program Relokasi Aceh

Buffer zone, merupakan salah satu strategi dalam manajemen bencana, dimana menjaukan masyarakat dari ancaman bencana. Suatu perencanaan tata ruang yang baik tentunya dapat meminimalisir resiko kerusakan gempa dan tsunami. Dengan karakteristik wilayah Aceh yang sebagian wilayahnya berada di pesisir, serta wilayah tersebut sensitif terhadap gempa dan tsunami, maka seharusnya kebijakan tata ruang pesisir harus menyediakan “ruang khusus”, yaitu *buffer zone*. “Ruang khusus” sebagai penyangga ini dapat dijadikan sebagai daerah mangrove, hutan pantai, hutan produksi terbatas, yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang penting bagi ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Pembentukan “ruang khusus” atau zona penyangga ini memiliki konsekuensi bahwa tidak ada manusia yang tinggal disana, bebas kegiatan konstruksi. Dilemanya, banyak wilayah di Indonesia yang pada *buffer zone* telah ditempati sebagai permukiman terlebih dahulu sebelum terjadi bencana. Pemerintah mengalami kesulitan untuk relokasi korban tsunami ke tempat yang lebih aman, jauh dari pesisir pantai karena alasan ketersediaan lahan dan dana, serta sebagian orang yang terkena dampak ingin tetap tinggal di wilayah tersebut dengan berbagai alasan, seperti ekonomi, sosial dan budaya.

Sedikit catatan terkait kebijakan *buffer zone* di Aceh

Political geographies of displacement. The tsunami generally worsened the humanitarian, social and economic situation of people living in the province of Aceh. The regions most affected-western and northern part of Sumatera island have long histories of exclusion, poverty and conflict. In Aceh and Srilanka, money to rebuild houses was plentiful, but coordinating housing reconstruction and securing the land on which to build them were more elusive.

*In both countries “buffer zone” policies that initially prohibited rebuilding homes near the sea generated another wave of displacement, politicising humanitarian aid. The buffer zone policy displaced yet again those who had already lost their homes through the dislocation of conflict and then the tsunami. In Srilanka, policy was politicised land grabbing on the part of a precarious government in one of the most densely populated countries in the world. Aceh in contrast, experiences a different kind of politicisation in relation to the buffer zones; there, however, much more resentment based on unequal treatment of “tsunami – affected” versus “war-affected” people emerged in the form of protest. (Blakie, *The Tsunami of 2004 in Srilanka: impacts and policy in the shadow of civil war*, 2013: 91). **

(Artikel disarikan dari wawancara JICA-BNPB tahun 2015: *Comparative study of humanitarian crisis management from the perspective of bilateral cooperation agencies: survey in Indonesia*).